

RAPAT EVALUASI DAN PENATAAN SAKIP

LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN SAKIP

1. PERMASALAHAN MANAJEMEN KINERJA ;
2. PROGRAM LOGIC DAN CASCADING KINERJA;
3. ARTI NILAI HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA;
4. E-SAKIP REVIUW (ESR)
5. PENERAPAN MANAJEMEN KINERJA;

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) UNTUK MENDORONG *MONEY FOLLOW PROGRAM*

INTEGRASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN MANAJEMEN KINERJA

LATAR BELAKANG

Belanja publik perlu ditekan, karena keterbatasan sumber daya.

Publik menuntut peningkatan kualitas pelayanan.



Budget Reform:

Dari sekadar alokasi tahunan yang didistribusikan antarinstansi dan dilaporkan realisasinya kepada Legislatif

Menjadi anggaran yang sinkron dengan perencanaan, operasional, dan pengukuran kinerja (Super Budgeting)

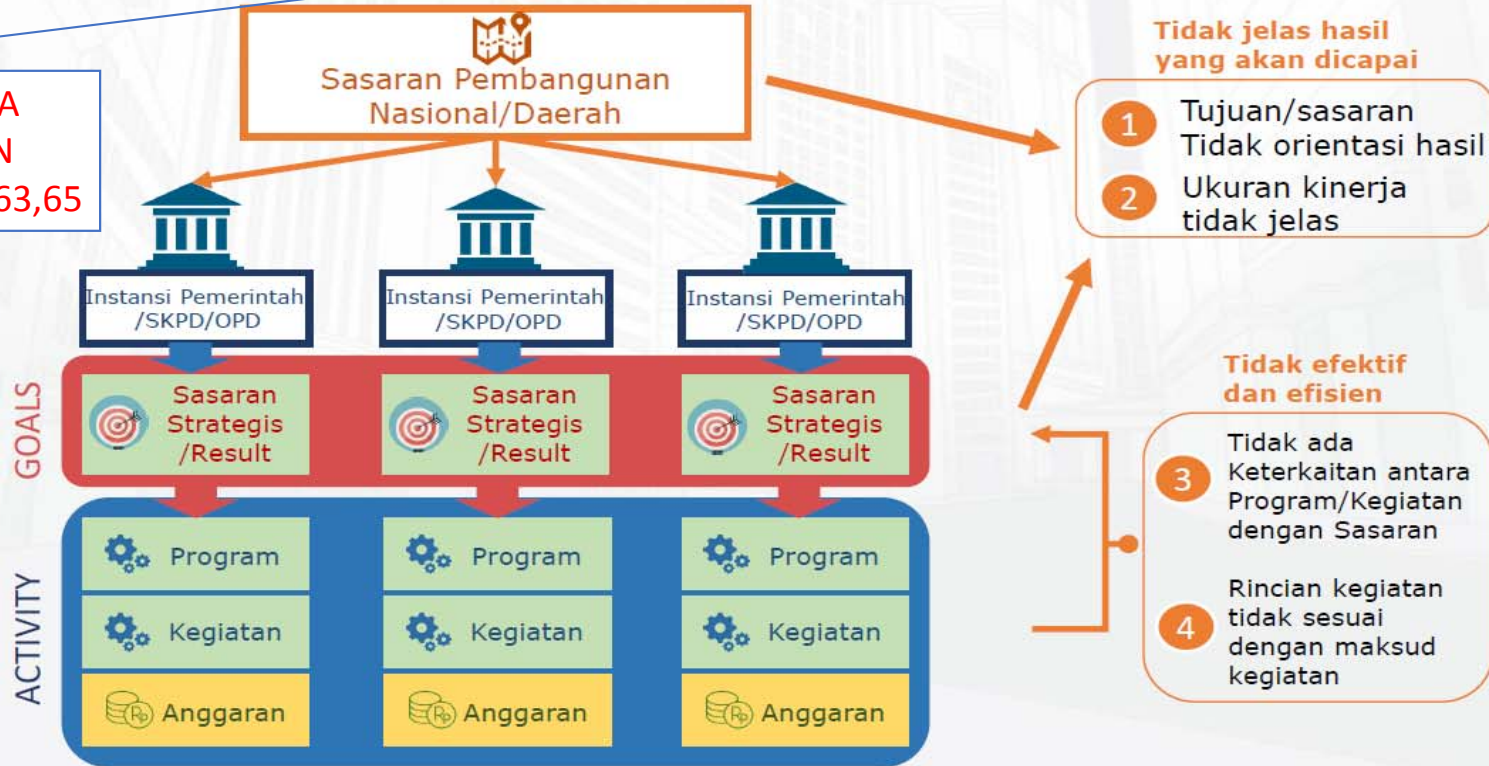


Budget Savings

PERMASALAHAN YANG SERING TIMBUL

INSTANSI PEMERINTAH DENGAN NILAI AKUNTABILITAS KINERJA DI BAWAH 70 (50 K/L, 24 PROV., 456 KAB./KOTA) BERPOTENSI MENGALAMI INEFISIENSI.
> 30% DARI APBN/APBD di luar Belanja Pegawai.

NILAI AKIP KOTA AMBON TAHUN 2018 ADALAH 63,65

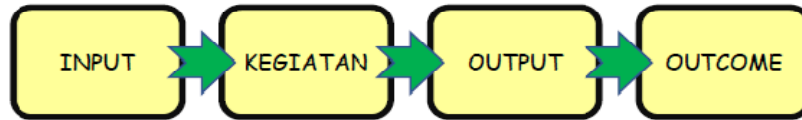


Syarat Mendapat Nilai BB dan A

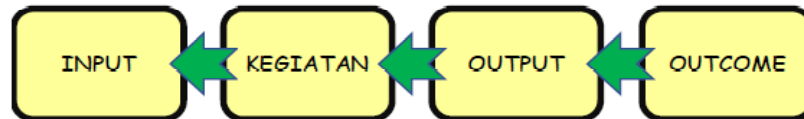
No	Acuan Penilaian	B	BB	A
1	SAKIP tingkat Pemda (RPJMD, IKU, PK, RKPD, Lapkin)	Baik	Baik (Ada, berkualitas)	Baik
2	Perangkat Daerah yang SAKIPnya baik	1/3 populasi	2/3 populasi (baik)	Semua populasi
3	Perjanjian Kinerja/PK hingga eselon 3 dan 4	Harus ada dan kualitas cukup (20%-<_80% selaras dengan PK di atasnya)	Harus ada dan kualitas baik (80%-95% selaras dengan PK di atasnya)	Harus ada dan kualitas baik (100% selaras dengan PK)
4	Rencana Aksi/RA (Penjabaran lebih lanjut dari target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja)	Ada dengan kualitas cukup (20%-<_80% selaras antara target PK dengan target periodik dalam RA)	Ada kualitas baik(80%-95% selaras antara target PK dengan target periodik dalam RA)	Harus ada
5	Cascading	Belum perlu	Harus ada dan berkualitas baik	Harus ada
6	Manajemen SAKIP	Cukup delegasi ke Sekretaris SKPD	(Ada, kualitas baik)Kepala PD harus terlibat dan mampu menjelaskan SAKIP di PD-nya	Kepala SKPD harus terlibat dan mampu menjelaskan SAKIP di SKPD-nya
7	Aplikasi SAKIP secara elektronik	Belum perlu	Harus ada	Harus ada, terintegrasiHarus ada
8	Evaluasi internal oleh Inspektorat	Harus ada	Harus ada dan berkualitas baik	Harus ada

POLA PROGRAM LOGIC

----- MEANS ----- ENDS -----



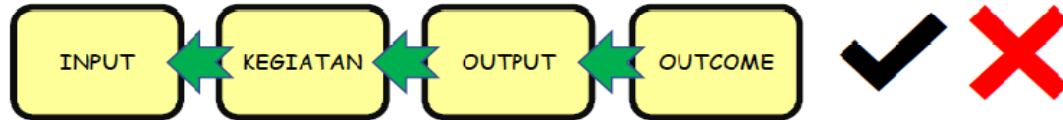
**PERFORMANCE BASED PLANNING DIMULAI
DARI HASIL YANG INGIN DICAPAI, BUKAN DARI
INPUT YANG DIMILIKI**



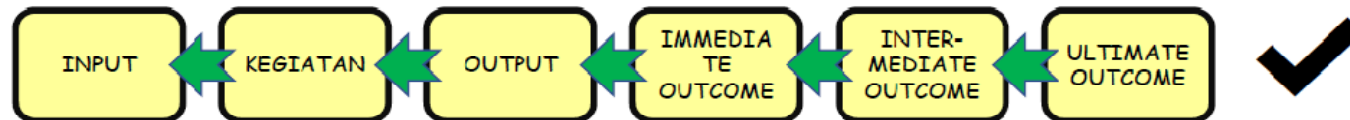
POLA PROGRAM LOGIC

----- MEANS -----

----- ENDS -----



1. UNTUK MENGHASILKAN OUTCOME TIDAK BISA LANGSUNG OUTPUT.
2. TERDAPAT SERANGKAIAN OUTCOME ANTARA YANG MENJEMBATANI OUTCOME AKHIR DENGAN OUTPUT

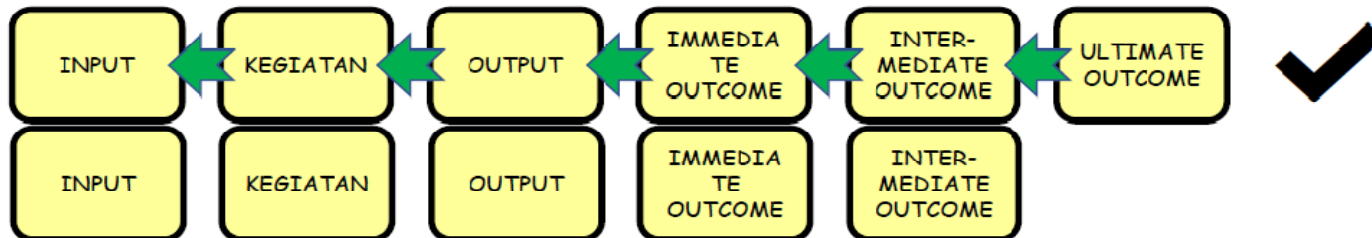


POLA PROGRAM LOGIC

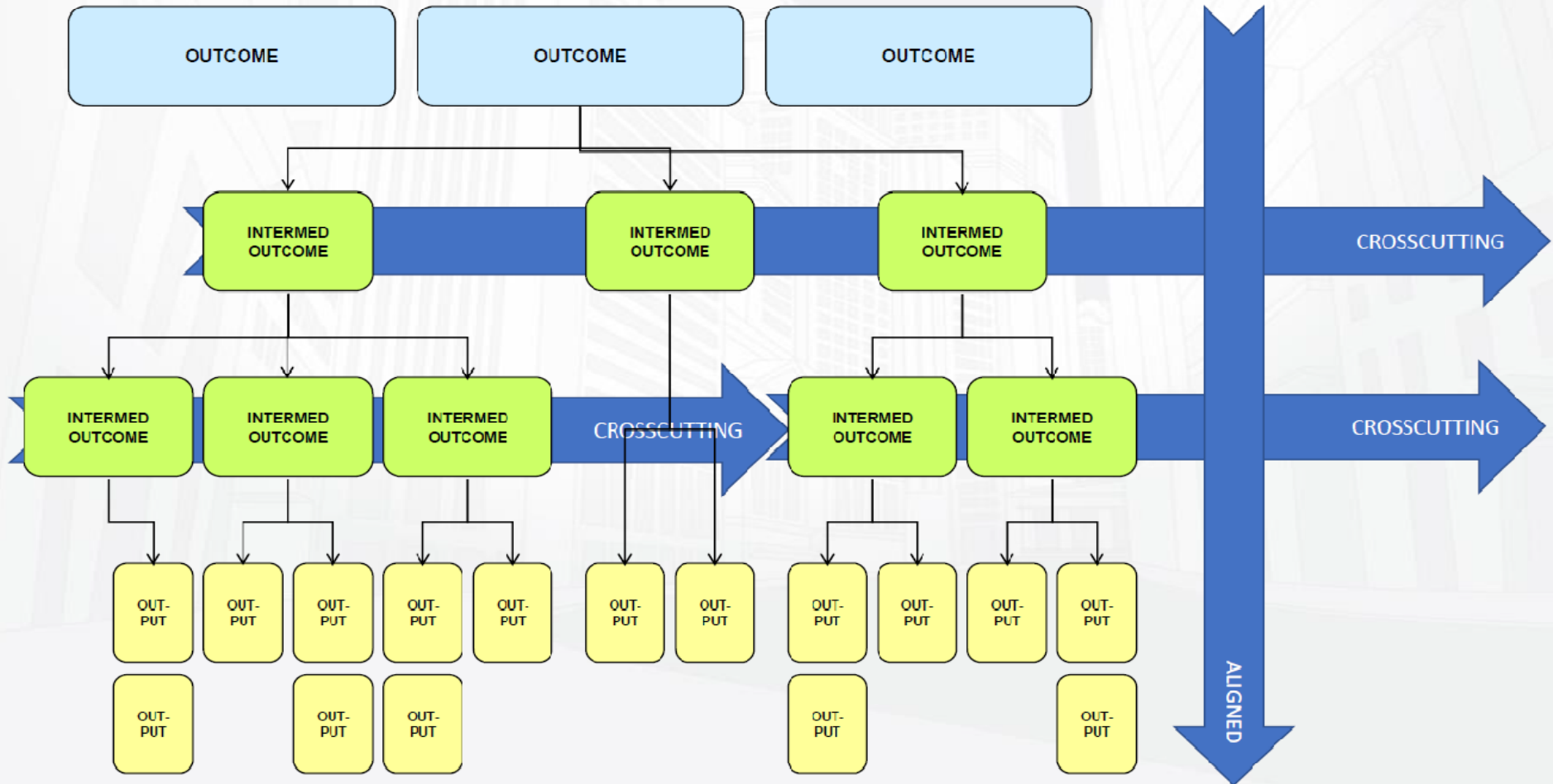


VARIABEL YANG MENYEBABKAN OUTCOME TIDAK SELALU LINIER HANYA BERASAL DARI SATU INPUT.

OUTCOME BIASANYA TERJADI DARI KOMBINASI BERBAGAI OUTCOME YANG LEBIH RENDAH, OUTPUT, PROSES KEGIATAN, DAN INPUT



POHON KINERJA



ARTI NILAI HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara/daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Peringkat	Nilai
AA	>90-100
A	>80-90
BB	>70-80
B	>60-70
CC	>50-60
C	>30-50
D	0-30

Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah untuk:

1. Merencanakan kinerja dan target kinerja,
2. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan,
3. Menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan,
4. Serta telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

e-SAKIP REVIEW

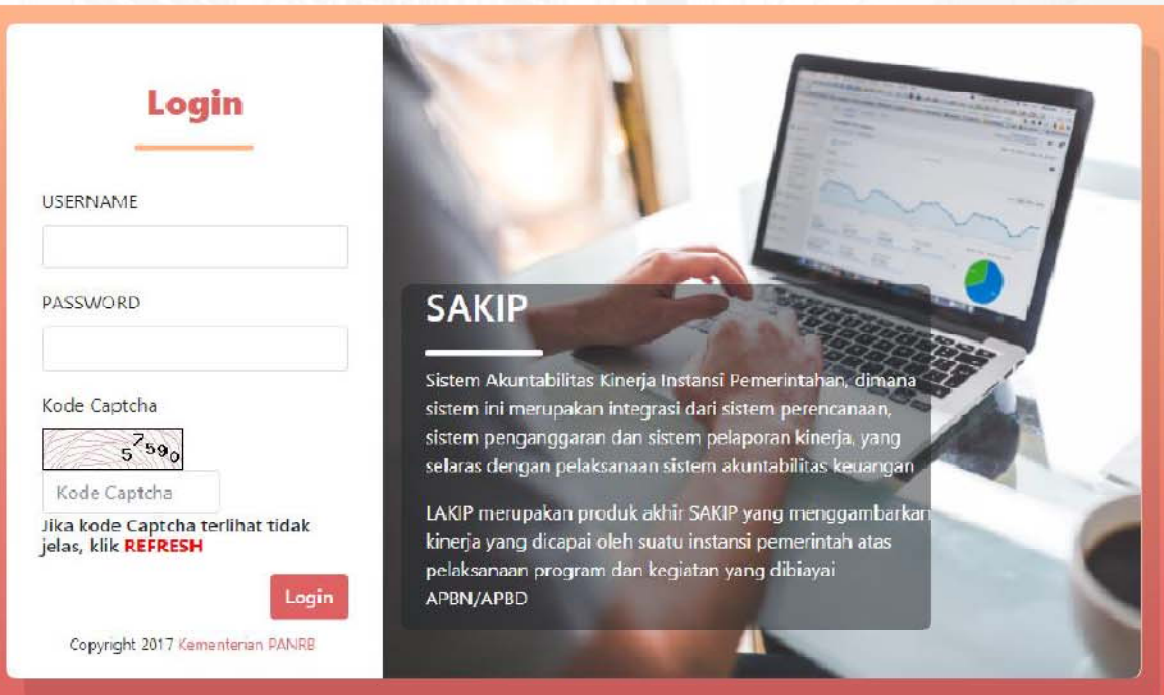
MASALAH : e-SAKIP PEMKOT AMBON –SERVER RUSAK

Tujuan :

1. Sarana pembinaan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (interaktif)
2. Sarana penyampaian laporan kinerja secara online.

User :
kementerian/lembaga/
pemerintah daerah

Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah
Paling lambat
31 Maret

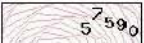


The image shows a composite of two parts. On the left is a screenshot of the e-SAKIP login interface. It features a 'Login' heading, followed by input fields for 'USERNAME' and 'PASSWORD'. Below these is a 'Kode Captcha' section with a distorted image of numbers '5 2 9 0' and a 'Refresh' button. A red 'Login' button is at the bottom right of the form. At the very bottom, it says 'Copyright 2017 Kementerian PANRB'. On the right is a photograph of a person's hands typing on a laptop. The laptop screen displays a dashboard with a line graph and a pie chart. A semi-transparent dark box is overlaid on the photo with the text 'SAKIP' and a description of the system.

Login

USERNAME

PASSWORD

Kode Captcha

Kode Captcha

Jika kode Captcha terlihat tidak jelas, klik **REFRESH**

Login

Copyright 2017 Kementerian PANRB

SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD

PENERAPAN MANAJEMEN KINERJA

Budaya Kinerja

Setiap individu dan unit kerja sudah secara otomatis bertanggung jawab atas pencapaian target kinerjanya

Efektifitas Kinerja

Penyusunan program kegiatan yang lebih efektif mengungkit kinerja

Sumber Daya Manusia

Setiap individu SDM memiliki ukuran dan target kinerja. Hal tersebut akan dijadikan dasar *reward and punishment*

Efisiensi Anggaran

Penyusunan program/kegiatan yang tepat untuk memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis

Organisasi

Menciptakan organisasi yang mengetahui kinerja yang akan dihasilkan



Tatalaksana

Menciptakan proses bisnis yang akan membantu pencapaian kinerja. Karena akan memberikan penjabaran kinerja yang saling berelasi satu sama lain untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari organisasi.

CASCADE RPJMD:

- 1. CASCADING TUJUAN, SASARAN, PROGRAM PEMDA...SPD , PPD
- 2. TUJUAN DAN INDIKATOR
- 3. SASARAN DAN INDIKATOR
- 4. PROGRAM PEMDA
- 5. SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 6. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

LEVEL PEMDA

- SAKIP tingkat Pemda (RPJMD, cascading, IKU, PK, RKT/RKPD, Lapkin), Harus baik dan berkualitas, meliputi : Budaya Kerja, SDM, Organisasi, Tatalaksana, Efektivitas Kinerja, Efisiensi anggaran;

LEVEL Perangkat Daerah

- SAKIP tingkat PD (RENSTRA, cascading, IKU, PK, RKT/RENJA, Lapkin, Rencana Aksi), Harus baik dan berkualitas;
- Kepala PD harus terlibat dan mampu menjelaskan SAKIP di PD-nya (Ada, kualitas baik, meliputi: Budaya Kerja, SDM, Organisasi, Tatalaksana, Efektivitas Kinerja, Efisiensi anggaran)

TINDALANJUT PENERAPAN MANAJEMEN KINERJA

BUDAYA KINERJA DAN SDM

- SETIAP INDIVIDU DAN UNIT KERJA SUDAH SECARA OTOMATIS BERTANGGUNG JAWAB ATAS CAPAIAN KINERJANYA;

Caranya:

- PENERAPAN APLIKASI SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN KINERJA ASN (SEMPE KASN) , PERLU SEGERA DISEMPURNAKAN;
- SETIAP INDIVIDU SUDAH MEMILIKI UKURAN DAN TARGET KINERJA;
- CAPAIAN KINERJA TERSEBUT MENJADI DASAR *REWARD AND PUNISHMAN*;
- PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA/ TPP BERDASARKAN UKURAN KINERJA INDIVIDU (ASPEK PRODUKTIVITAS DAN ASPEK DISIPLIN) sesuai Perwali No.....;
- PENERAPAN SANKSI SAMPAI PEMBERHENTIAN DAPAT MENGACU KE TARGET KINERJA.

ORGANISASI DAN TATALAKSANA

- MENCIPTAKAN ORGANISASI YANG MENGETAHUI KINERJA YANG AKAN DIHASILKAN;

Caranya:

- MENGUBAH TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI YANG DISESUAIKAN DENGAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA ORGANISASI

- MENCIPTAKAN PROSES BISNIS YANG AKAN MEMBANTU CAPAIAN KINERJA, KARENA AKAN MEMBERIKAN KINERJA YANG SALING BERELASI SATU SAMA LAIN UNTUK Mendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Organisasi;

LIHAT CONTOH PROSES BISNIS PERANGKAT DAERAH KAB SLEMAN PADA ALAMAT : sakup.sleman.go.id/main/php

EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN

- PENYUSUNAN PROGRAM KEGIATAN YANG LEBIH EFEKTIF MENGUNGKIT KINERJA
- PENYUSUNAN PROGRAM/ KEGIATAN YANG LEBIH TEPAT UNTUK MEMASTIKAN BAHWA ANGGARAN MEMANG DIALOKASIKAN HANYA UNTUK PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS;
- MENGGABUNGKAN KEGIATAN YANG SERUMPUN SEHINGGA BERDAMPAK PADA EFISIENSI ANGGARAN. MISALNYA UNTUK ATK, PENGGANDAAN,dll dapat menjadi efisien.

SATU DATA INDONESIA (perpres No.39 tahun 2019)

- Pasal 20, untuk data statistic tingkat daerah, Pembina data statistic tingkat daerah yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan bidang statistic di provinsi atau kab/kota; (BPS Kota Ambon);
- Pasal 21, Walidata tingkat Daerah dilaksanakan oleh instansi daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan data, (Dinas Kominfo);
- Pasal 24 ayat (4) Sekerataria Forum Satu Data Indonesia ditingkat Daerah secara ex-officio Dan secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja dilingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah. (Bappekotlitbang).
- Sekretariat FSDI Bertugas :
 - a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrative kepada FSDI tingkat Daerah;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan FSDI tingkat Daerah.

Perencanaan Data (pasal 26)

- (1) Instansi pusat melaksanakan perencanaan data yang terdiri atas:
 - a. Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya;
 - b. Penentuan daftar data yang dijadikan data prioritas; dan/atau
 - c. Penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Instansi daerah melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (3) Dalam menyusun daftar data, instansi Daerah mengacu pada daftar data yang ditentukan pada ayat (1)

HAL-HAL YANG AKAN DIKERJAKAN:

1. memberikan masukan terkait Nama dari Tujuan, Sasaran, Program Pemda dan masing-masing indikatornya;
2. membuat Sasaran Strategis dan Program Perangkat Daerah;
3. Membuat Pohon Kinerja;
4. Membuat IKU yang telah disesuaikan;
5. Membuat rancangan PK 2020;
6. Membuat Draf Renstra baru;
7. Membuat Lakip (perhatikan pemenuhan 9 unsur Lakip yang baik)

SEKIAN DAN TERIMA KASIH